



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3692-3704

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara Berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir

Suci Adisti^{1✉}, Mimin Sundari Nasution²

Universitas Riau

Email: suci.adisti2672@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi PSR secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi PSR di Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal. Indikator tujuan masih belum tercapai, kendati keberhasilan awal terlihat dari perubahan fisik kebun, meningkatnya partisipasi petani, dan luasan lahan yang diremajakan. Meskipun berbagai alternatif telah dilakukan, namun masih terdapat kendala pada sumber daya yang membatasi, seperti keterbatasan dana pasca penanaman serta tenaga pendamping PSR, hambatan terkait legalitas, kurangnya kerja sama dengan mitra, dan pendampingan teknis di lapangan. Untuk itu, peneliti merekomendasikan penambahan tenaga pendamping, percepatan penyelesaian legalitas lahan, serta meningkatkan kerja sama dengan mitra. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji model kemitraan yang lebih efektif, dampak sosial PSR, maupun optimalisasi PSR di lahan gambut.

Kata Kunci: *Keberlanjutan, Optimalisasi, Peremajaan Sawit Rakyat, PSR*

Abstract

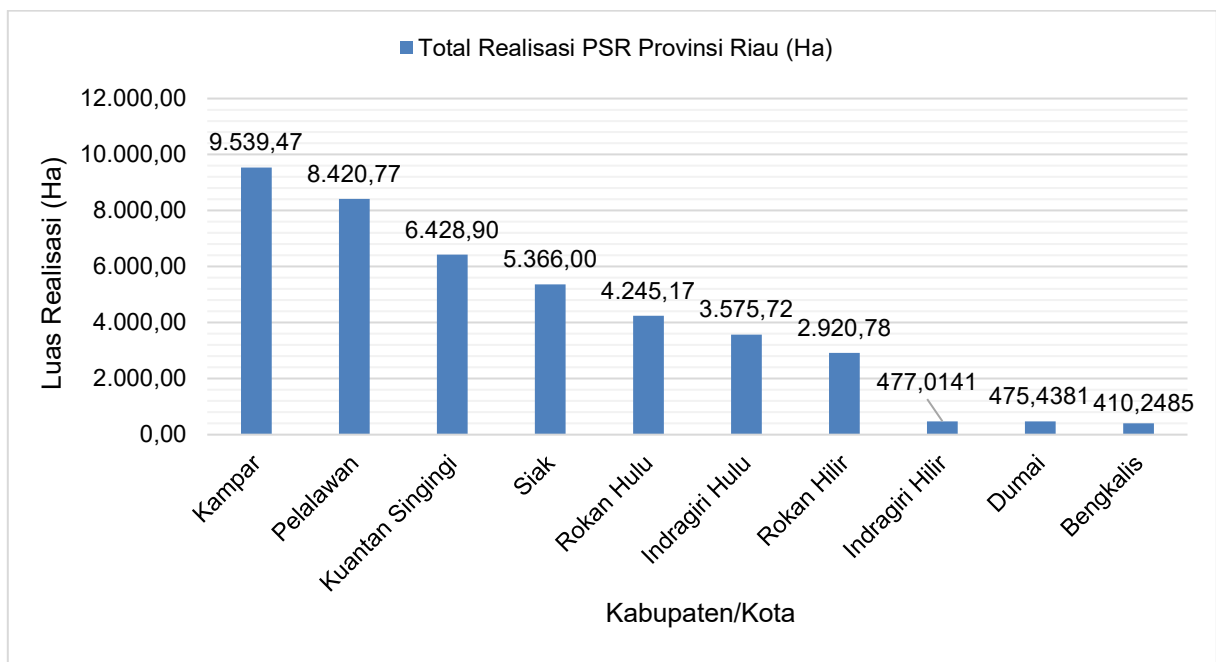
This study aims to analyze the optimization of PSR in a sustainable manner in Indragiri Hilir Regency and identify the inhibiting factors. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, this research found that the optimization of PSR in Indragiri Hilir Regency has not been optimal. The goal indicators have not yet been achieved, although initial successes can be seen from physical changes in the plantation, increased farmer participation, and the area of rejuvenated land. Although various alternatives have also been carried out, there are still constraints on limiting resources, such as limited post-planting funds and PSR assistants, obstacles related to legality, lack of cooperation with partners, and technical assistance in the field. For this reason, researchers recommend the addition of assistants, accelerating the completion of land legality, and increasing cooperation with partners. In addition, future research can examine more effective partnership models, the social impact of PSR, and the optimization of PSR on peatlands.

Keywords: *Optimization, People's Palm Oil Replanting, PSR, Sustainability*

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar, terutama perkebunan milik rakyat. Menurut data dari Inhil Satu Data Merdeka (ISTAKA, 2023), luas areal perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Inhil hingga tahun 2023 tercatat sekitar 109.351 hektar. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat produktivitasnya menurun akibat penggunaan bibit yang tidak unggul, tidak hanya terjadi di Inhil saja, akan tetapi di Provinsi Riau secara umum. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2024), produktivitas sawit di Riau menurun dari 3.726 kilogram/hektar (kg/ha) pada 2021, menjadi 3.461 kg/ha pada tahun 2022. Selain itu, penurunan produktivitas ini juga diakibatkan oleh banyaknya tanaman sawit tua yang telah melewati masa produktif dan rusak yang luasnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2024) dalam Statistik Perkebunan Jilid 1 Tahun 2023-2025, luas tanaman tua dan rusak (TTR) luas TTR di Provinsi Riau mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan angka 100.616 hektar, lebih dari 30.000 hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dalam dua tahun terakhir, luas TTR berkurang hampir 11.000 hektar, dimana 5.139 hektar nya terdapat di Kabupaten Inhil. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam merevitalisasi perkebunan sawit agar lebih produktif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dimaksud adalah dengan program peremajaan (*replanting*).

Rahmadini & Mayarni (2024) menyebutkan bahwa sejak tahun 2017, Pemerintah Indonesia menjadikan peremajaan kelapa sawit sebagai salah satu prioritas dalam upaya memperbaiki tata kelola sektor kelapa sawit. Melalui kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemerintah merancang sebuah inisiatif yang disebut sebagai Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini termasuk dalam Program Strategis Nasional yang dirancang untuk mengganti tanaman sawit tua dan kurang produktif, dengan tanaman baru yang memiliki potensi produksi lebih tinggi, tanpa perlu membuka lahan perkebunan yang baru.



Gambar 1. Realisasi PSR Provinsi Riau dalam hektar (Ha) tahun 2017-2024

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024, data diolah

Berdasarkan data pada gambar 1. tersebut, realisasi PSR di Provinsi Riau pada tahun 2017-2023 menunjukkan adanya variasi pencapaian antar kabupaten/kota. Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kuantan Singingi mencatat realisasi terbesar. Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir, Dumai, dan Bengkalis menjadi daerah dengan capaian realisasi terendah. Kabupaten Inhil sendiri mencatat realisasi sebesar 477,0141 hektar, yang menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan realisasi PSR terendah di Provinsi Riau. Faktor ini menjadi salah satu alasan utama peneliti menentukan Kabupaten Inhil sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Berikut ini disajikan visualisasi perbandingan total realisasi PSR antar kabupaten/kota di Provinsi Riau.

PSR di Kabupaten Inhil baru mulai mencapai realisasinya pada tahun 2021. Dikutip dari *Sawitsetara.co* (2022), realisasi PSR Inhil yang dinilai lebih lambat dibandingkan daerah lain

di Provinsi Riau diakibatkan oleh berbagai kendala yang dihadapi petani, yakni adanya penambahan syarat bebas dari kawasan lindung gambut serta tidak berada di kawasan hutan. Sementara topografi Kabupaten Inhil hampir semua daerahnya berupa tanah gambut dan masih banyak lahan-lahan milik petani yang berada di kawasan hutan, karena perkebunan tersebut telah dikembangkan warga setempat sejak lama. Oleh karena itu, laju peremajaan sawit di Inhil berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya. Bahkan hingga saat ini, PSR di Kabupaten Inhil belum pernah mencapai target realisasinya.

Tabel 1. Perkembangan PSR di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2024

Tahun	Target (Ha)	Luas Peremajaan (Ha)	% Realisasi
2020	1.000	-	0%
2021	2.000	155,4123	8%
2022	500	-	0%
2023	450	252,7787	56,17%
2024	600	68,8231	11,47%
Total		477,0141	75,64%

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2024, data diolah

Data dari tabel 1. ini menunjukkan bahwa capaian PSR di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, meskipun ditargetkan 1.000 hektar (Ha) untuk peremajaan, akan tetapi tidak ada realisasi yang tercapai. Kemudian, di tahun 2021, terlihat bahwa target peremajaan mencapai puncaknya, namun realisasi masih jauh di bawah target. Tahun 2023 menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun lainnya, meskipun target yang ditetapkan lebih rendah. Kabupaten Indragiri Hilir baru berhasil meremajakan 477,0141 hektar kebun sawit rakyat melalui PSR, hanya sekitar 9,54% dari jumlah luasan tanaman sawit tua dan rusak yang mencapai lebih dari 5.000 hektar di daerah ini. Tingkat pencapaian realisasi tersebut tergolong masih rendah dibandingkan beberapa daerah lain yang juga melaksanakan PSR di Provinsi Riau.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana optimalisasi PSR secara berkelanjutan telah dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moleong dalam (A. F. Nasution, 2023), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dengan mendeskripsikannya melalui kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alamiah. Sedangkan pendekatan studi kasus menurut Baxter & Jack dalam (Fadli, 2021) adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu hal yang diteliti, baik berupa program, peristiwa, aktivitas, dan sebagainya untuk memperoleh pengetahuan dan informasi secara mendalam mengenai hal tersebut. Fenomena yang dipilih umumnya disebut sebagai kasus, yaitu peristiwa nyata yang sedang berlangsung (*rel-life events*).

Menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama informan penelitian yang meliputi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah desa, petani sawit yang mengikuti program PSR, serta petani sawit non-PSR, observasi ke lokasi penelitian, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Desa Rumbai Jaya yang terletak di Kecamatan Kempas. Lokasi ini dipilih karena telah melaksanakan program PSR namun belum mencapai target. Desa Rumbai Jaya sendiri masih menghadapi tantangan utama dalam pelaksanaan PSR mencerminkan permasalahan dalam pelaksanaan PSR yang juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2018) dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara Berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir

Optimalisasi oleh Sumartono et al. (2020) didefinisikan sebagai sebagai suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Sedangkan optimasi diartikan sebagai suatu bentuk pengoptimalan atas suatu hal yang sudah ada sebelumnya. usaha untuk memaksimalkan kegiatan agar dapat mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Nasution & Marpaung (2023), juga menyebutkan bahwa

optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi. Optimal erat kaitannya dengan kriteria untuk hasil yang diperoleh. Sehingga optimalisasi dapat diartikan sebagai usaha optimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, menurut Estianggari et al. (2022), optimalisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan guna mencapai keuntungan dan hasil yang diinginkan atau diharapkan.

Pada kajian lainnya, Rattu et al. (2022) mendefinisikan optimalisasi sebagai usaha untuk memaksimalkan kegiatan agar dapat mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki, yang hanya dapat tercapai apabila dilakukan secara efektif serta efisien. Selaras dengan uraian mengenai konsep organisasi oleh Husin (2022), bahwa tujuan dalam penyelenggaraan organisasi adalah untuk mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Menurut Lestari & Nasution (2023), sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesamaan tujuan, visi, dan misi yang mencerminkan keberadaan kelompok di tengah masyarakat. Suatu organisasi akan dianggap baik apabila dapat diakui eksistensinya oleh masyarakat karena mampu berkontribusi dalam merekrut anggota yang bersumber dari orang-orang di lingkungan sekitar tempat organisasi tersebut berada. Meskipun organisasi mengalami perubahan keanggotaan secara konstan, orang-orang di dalamnya memiliki keterkaitan yang berkelanjutan, sama halnya dengan keberadaan kelompok tani yang merekrut para petani di lingkungan sekitarnya.

Singiresu S. Rao dalam (Hidayat & Irvanda, 2022) mendefinisikan optimalisasi sebagai proses menemukan kondisi yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi, bergantung pada situasi yang diberikan. Sementara itu, Wulandani et al. (2022) mendefinisikan optimalisasi dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu sebagai poses pelaksanaan program yang direncanakan dengan struktur yang jelas untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu, guna meningkatkan kinerja secara maksimal. Sedangkan menurut Nurrohman dalam (Alimuddin & Ahsan, 2022), menyatakan bahwa optimalisasi merupakan upaya meningkatkan kinerja, baik pada unit kerja maupun individu yang terlibat dalam kepentingan umum, dengan tujuan untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian Bilad (2023), mengemukakan ada beberapa indikator yang perlu diidentifikasi selama proses implementasi optimalisasi, untuk memastikan suatu perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator-indikator tersebut meliputi tujuan, keputusan dan disposisi.

1) Tujuan

Indikator tujuan dalam hal ini dapat berupa maksimasi maupun minimasi. Maksimasi jika pengoptimalan terkait dengan peningkatan keuntungan dan sejenisnya, sedangkan minimasi jika pengoptimalan terkait dengan pengurangan biaya, waktu, dan hal-hal sejenisnya.

2) Keputusan

Pengambilan keputusan selalu melibatkan pemilihan dari beberapa opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan tujuan akhir menghasilkan keputusan yang paling optimal.

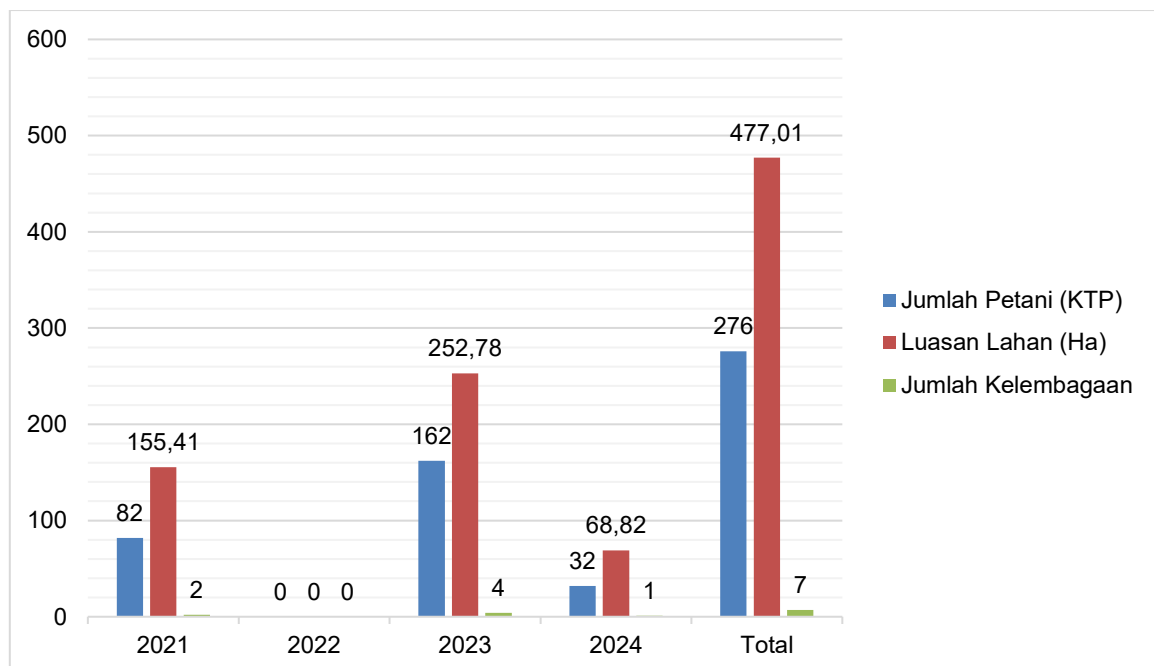
3) Disposisi

Disposisi merupakan bagian dari sikap dan komitmen para pelaku atau perancang, terhadap program yang dilaksanakan, sebagai langkah lanjutan dalam penyelesaian.

Perlu diketahui bahwa penelitian ini mengacu pada teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo dalam (Ardiansyah et al., 2022), dimana optimalisasi diartikan sebagai upaya pencapaian solusi terbaik dari sekian banyak pilihan yang memenuhi kriteria tertentu, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa optimalisasi PSR di Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Analisisnya dilakukan dengan menggunakan tiga indikator optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo berikut ini.

Tujuan

Pada optimalisasi, tujuan dapat berbentuk maksimalisasi maupun minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berkaitan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimalisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Pada pelaksanaan program PSR di Kabupaten Indragiri Hilir, optimalisasi dilakukan dengan tujuan maksimalisasi, dimana PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dengan mengganti tanaman tua dan tidak produktif dengan bibit unggul, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih maksimal. Meskipun kebun sawit yang telah diremajakan belum memasuki masa produksi, namun indikator keberhasilan awal dari pencapaian tujuan terlihat dari perubahan fisik kebun. Selain itu, terus terjadi peningkatan jumlah hektar lahan, jumlah petani, hingga kelembagaan yang mengikuti PSR di Kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 1. Perkembangan jumlah petani, lahan, dan kelembagaan PSR di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2024, data diolah

Data pada gambar 2 menunjukkan perkembangan jumlah petani, luas lahan yang diremajakan, serta jumlah kelembagaan yang mengikuti program PSR di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun. Tahun 2023 mencatat realisasi yang tinggi, yaitu 56,17% dari target yang ditetapkan, dengan jumlah petani, luas lahan, serta kelembagaan yang meningkat signifikan dari realisasi awal. Sementara itu pada tahun 2024, meskipun jumlah petani, luas lahan, dan kelembagaan yang berhasil realisasi tampak rendah, hal ini bukan disebabkan oleh menurunnya partisipasi, melainkan akibat proses verifikasi yang memerlukan waktu lama. Kondisi ini dibuktikan dari tahun tersebut yang hanya mencatat realisasi 68,82 hektar lahan dari 32 petani dalam satu kelembagaan, yaitu Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Suka Jaya Kecamatan Pulau Burung. Sementara 537 petani dengan luas lahan 986 hektar dari 8 kelembagaan. Meskipun terdapat perubahan fisik kebun. peningkatan jumlah hektar lahan, jumlah petani, hingga kelembagaan yang mengikuti PSR, namun penelitian ini menemukan bahwa hasil optimal masih belum tercapai sepenuhnya karena tanaman sawit yang telah diremajakan masih dalam tahap pertumbuhan dan belum menghasilkan.

Alternatif keputusan

Alternatif keputusan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Pengambilan keputusan dihadapkan pada sejumlah alternatif pilihan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Alternatif ini tentunya harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Alternatif keputusan dalam hal ini mengacu pada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program PSR. Dalam upaya mengoptimalkan PSR, berbagai keputusan strategis telah diterapkan. Pemilihan bibit unggul dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dinas Perkebunan dan penggunaan platform Bank Benih Perkebunan (BabeBUN), untuk memastikan bibit unggul berasal dari penyedia resmi. Kelompok tani memiliki kewenangan dalam menentukan varietas bibit yang digunakan, seperti varietas *Yangambi* yang dipilih oleh petani di Desa Rumbai Jaya karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan mereka. Selain itu, metode peremajaan juga menjadi pertimbangan penting dalam optimalisasi PSR. Kombinasi metode *tumbang rumpuk* dan *stacking bangkit* diterapkan di desa Rumbai Jaya karena dinilai lebih sesuai dengan karakteristik lahan gambut di wilayah tersebut. Melalui kombinasi kedua metode ini, pohon sawit tua ditebang serempak kemudian dirumpuk dalam barisan tertentu, serta dibuat parit di antara dua baris tanaman untuk mengoptimalkan sistem drainase dan mencegah genangan air yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman baru.

Dari segi pendanaan, dana pada tahap awal program yang sebelumnya hanya mencukupi hingga tahap penanaman. tanpa mempertimbangkan kebutuhan biaya perawatan lanjutan, seperti pemupukan dan pengelolaan kebun hingga tanaman menghasilkan. Hal ini mengakibatkan beberapa kebun sawit tidak terawat karena petani kekurangan dana untuk merawatnya. Sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Carolina & Mayarni (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan dana merupakan salah satu kendala utama dalam program PSR di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, pemerintah melakukan peningkatan skema dana bantuan *replanting* dari Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektar agar petani tidak hanya dapat melakukan penanaman ulang, tetapi juga mampu memelihara kebun hingga tanaman memasuki masa produktif. Namun sebelum kebijakan ini terealisasi secara penuh, petani di Desa Rumbai Jaya masih menghadapi tantangan finansial dalam merawat kebun mereka. Oleh karena itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menjalin kerja sama dengan pihak bank untuk jaminan pendapatan sementara bagi petani selama masa transisi, meskipun inisiatif ini masih dalam tahap negosiasi. Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui pembentukan koperasi oleh Kelompok Tani Kelapa Sawit Tani Jaya sebagai upaya meningkatkan daya tawar petani dan mengelola dana secara lebih terstruktur.

Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya yang membatasi merujuk pada sumber daya yang tidak mencukupi atau memiliki keterbatasan tertentu sehingga menghambat pencapaian suatu tujuan. Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, optimalisasi PSR di Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi keterbatasan sumber daya, berupa keterbatasan dana pasca tanam dan keterbatasan sumber daya manusia yaitu tenaga pendamping PSR. Dana hibah yang diberikan pemerintah masih berfokus pada tahap awal peremajaan dan belum sepenuhnya mencukupi untuk pemeliharaan kebun pasca tanam, sehingga banyak kebun yang akhirnya tidak terawat dan terbengkalai. Sebagai respons atas kendala ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru berupa peningkatan dana hibah menjadi Rp60 juta per hektar. Kebijakan ini dirancang untuk mencakup seluruh proses peremajaan, termasuk perawatan dan pemeliharaannya hingga tanaman menghasilkan. Namun, kebijakan tersebut belum terealisasi di Desa Rumbai Jaya, karena program PSR yang sedang berjalan masih menggunakan skema pendanaan Rp30 juta.

Di lain sisi, jumlah tenaga pendamping yang terbatas juga menjadi kendala dalam optimalisasi PSR di Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini, satu pendamping harus menangani beberapa desa sekaligus. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Surya Syurgana Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disbun Inhil berikut ini.

"Jumlah pendamping kami tidak banyak dan terbatas. Saat ini, hanya ada empat orang petugas pendamping khusus mendampingi petani calon PSR untuk satu kecamatan. Sedangkan satu kecamatan bisa terdiri dari lebih dari sepuluh desa, sehingga petugas kami cukup kewalahan karena idealnya setiap desa setidaknya memiliki satu petugas pendamping agar prosesnya berjalan optimal." (Wawancara pada tanggal 5 Juli 2024).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa idealnya satu desa memiliki satu tenaga pendamping untuk memastikan PSR berjalan optimal. Namun, keterbatasan jumlah SDM yang tersedia membuat kondisi ideal tersebut sulit direalisasikan. Tenaga pendamping lebih berperan sebagai fasilitator ketika petani menghadapi masalah atau kendala tertentu, dibandingkan secara aktif memantau dan mengarahkan setiap tahapan proses PSR, sehingga pendampingan cenderung bersifat reaktif, yaitu hanya dilakukan berdasarkan permintaan petani. Pendampingan yang kurang merata juga mengakibatkan kesenjangan informasi dalam pengetahuan dan praktik di lapangan bagi petani, terutama dalam memahami persyaratan administrasi serta teknik budidaya sawit yang baik. Jika tenaga pendamping lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi awal dan memberikan bimbingan secara berkala, maka potensi kesalahan dalam proses administrasi dapat diminimalisir.

Selain itu, pendampingan yang lebih aktif juga dapat membantu petani memahami praktik terbaik dalam budidaya sawit, meningkatkan hasil panen, serta memastikan keberlanjutan program PSR di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal. Meskipun terjadi peningkatan jumlah petani maupun lahan yang telah diremajakan, perubahan fisik kebun, hingga penerapan berbagai alternatif seperti peningkatan dana hibah dan penerapan metode peremajaan yang sesuai dengan kondisi lahan, namun implementasinya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut serta masih menghadapi keterbatasan dalam hal dana pasca tanam dan tenaga pendamping. Selain itu, faktor-faktor seperti masalah legalitas dan status lahan, tidak adanya kerja sama dengan mitra, serta kurangnya pendampingan teknis turut menjadi penghambat dalam proses optimalisasi PSR di daerah ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah tenaga pendamping dengan satu pendamping per desa yang dibekali pelatihan teknis dan dievaluasi setiap enam bulan, percepatan penyelesaian legalitas lahan melalui pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Legalitas Lahan, serta memperluas kemitraan dengan pihak bank maupun perusahaan sawit. Selain itu, pelatihan intensif setiap tiga bulan perlu diperkuat untuk meningkatkan teknik budidaya kebun sawit memastikan keberlanjutan lingkungan dan program PSR yang lebih optimal lagi di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2024). Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2022 (Vol. 3). Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2024). Statistik Perkebunan Jilid 1 2023-2025. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Harfa Creative.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (28th ed.). Alfabeta.
- Jurnal dan Publikasi Lainnya | Journal and Other Scientific Publications
- Alimuddin, S., & Ahsan, M. (2022). Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan pada UPTD Puskesmas Lakessi Parepare. *Journal of Mathematics Learning Innovation*, 1(2), 163–175.

- Ardiansyah, O., Vestikowati, E., & Anwar, A. N. R. (2022). Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Desa dalam Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa Cimanggu Kecamatan Lengklancar Kabupaten Pangandaran.
- Bilad, A. S. (2023). Optimalisasi Analisis Teknikal pada Saham Pertambangan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII 30) Pasca Covid-19. <http://repository.iainkudus.ac.id/10068/>
- Carolina, M. P., & Mayarni. (2024). Peran Aktor dalam Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 50–60.
- Estianggari, F., Anwar, H. S., & Wahyu, F. P. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa pada Tahun 2020 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi). Panengen: *Journal of Indigenous Knowledge*, 1(1), 66–74.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 281–290. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1611>
- Husin, I. (2022). Teori Organisasi. *Informatics, Science, and Technologies Journal*, 12(2), 56–65.
- ISTAKA. (2023). Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat (Ha) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023. ISTAKA. <https://data.inhilkab.go.id/dataset/luas-areal-tanaman-perkebunan-rakyat-ha-di-kabupaten-indragiri-hilir-tahun-2022-2023/resource/61a18a2a-f8af-4636-888c-899f3b99fd5b>
- Lestari, A. L., & Nasution, M. S. (2023). Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 2(2), 184–198. <https://doi.org/doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.67>
- Nasution, N. A., & Marpaung, S. F. (2023). Strategi Kepala Madrasah Dalam Optimalisasi Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 317–329. <https://doi.org/1031538/munaddhomah.v4i2.426>
- Rahmadini, N., & Mayarni. (2024). Tata Kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Lahan Gambut di Kabupaten Indragiri Hilir. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(1), 28–41. <https://doi.org/10.46730/jiana.v22i1.8155>
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial dan

Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.

Sawitsetara.co. (2022, November 21). Tiga Tahun Menunggu PSR, Mimpi Ratusan Petani Sawit di Inhil Akhirnya Terkubur. Sawitsetara.Co. <https://www.sawitsetara.co/tiga-tahun-proses-menunggu-psr-mimpi-ratusan-petani-sawit-di-inhil-akhirnya-terkubur/>

Sumartono, A. M., Sampe, S., & Kumayas, N. (2020). Optimalisasi Informasi Aplikasi (SiTasya) Sistem Pemantauan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–12.

Wulandani, S. A., Amallia, T., & Yusra, Z. N. (2022). Optimalisasi Target dan Realisasi Pajak pada E-Filling di Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1), 22–30.